Synergy: Journal of Collaborative Sciences
Vol. 1, No. 1, 2025
e-ISSN: _____ (online)
https://sinesia.org/index.php/Synergy/index

Agama Menjadi Instrument Kekuasaan: Analisis Konflik Hindu-Muslim Di India Pasca Naiknya Narendra Modi

Religion Becomes an Instrument of Power: An Analysis of Hindu-Muslim Conflict in India Following the Rise of Narendra Modi

Febrian Arif Pratama
febrianarifpratama07@gmail.com
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Info Article
|**Submitted**: 2 June 2025|**Revised**: 26 June 2025|**Accepted**: 26 June 2025
How to Cite : Febrian Arif Pratama, "Agama Menjadi Instrument Kekuasaan: Analisis Konflik Hindu-Muslim Di India Pasca Naiknya Narendra Modi", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 1, No. 1, 2025, P. 17-39.

ABSTRACT

The conflict between Hindu and Muslim communities in India has significantly escalated since Narendra Modi's rise as Prime Minister in 2014. This article uses a qualitative research method based on library research with a critical discourse analysis approach to explore the dynamics of the conflict. The theoretical framework used refers to the Hasenclever & Rittberger (2000) model, which includes primordialist, instrumentalist, and constructivist perspectives. Through this approach, the article analyzes how religion functions not only as a source of identity, but also as a political instrument and politicized social construction. The instrumentalist approach highlights how political elites, especially the Bharatiya Janata Party (BJP), utilize religion-based rhetoric and policies for electoral interests and consolidation of power through Hindutva ideology. Meanwhile, the constructivist approach explains how religious identity and Hindu nationalist narratives are formed through education, media, and state symbols that systematically exclude Muslims from national discourse. Thus, this article concludes that religious conflict in contemporary India is not merely a conflict of faith, but a product of mutually perpetuating political and social engineering.

Keywords: *Hindutva, Narendra Modi, Primordialism, Instrumentalism, Constructivism.*

ABSTRAK

Konflik antara komunitas Hindu dan Muslim di India mengalami eskalasi signifikan sejak naiknya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengeksplorasi dinamika konflik tersebut. Kerangka teori yang digunakan merujuk pada model Hasenclever & Rittberger (2000), yang mencakup perspektif primordialist, instrumentalist, dan constructivist. Melalui pendekatan ini, artikel menganalisis bagaimana agama berfungsi tidak hanya sebagai sumber identitas, tetapi juga sebagai instrumen politik dan konstruksi sosial yang dipolitisasi. Pendekatan instrumentalist menyoroti bagaimana elite politik, khususnya Partai Bharatiya Janata Party (BJP), memanfaatkan retorika dan kebijakan berbasis agama untuk kepentingan elektoral dan konsolidasi kekuasaan melalui ideologi Hindutva. Sementara itu, pendekatan constructivist menjelaskan bagaimana identitas keagamaan dan narasi nasionalisme Hindu dibentuk melalui pendidikan, media, dan simbol-simbol negara yang secara sistematis mengeksklusi Muslim dari wacana kebangsaan. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa konflik keagamaan di India kontemporer bukan semata pertentangan iman, melainkan produk rekayasa politik dan sosial yang saling melanggengkan.

Kata Kunci: *Hindutva, Narendra Modi, Primordialisme, Instrumentalisme, Konstruktivisme.*

Pendahuluan

Agama, dalam sejarah manusia, tidak pernah hadir hanya sebagai soal kepercayaan personal, namun agama juga menjadi sebuah hal yang dikaitkan dengan relasi sosial dan keharmonian. Ia selalu punya daya hidup yang lebih luas membentuk identitas kolektif, menentukan batas sosial, dan bahkan menyalakan bara konflik. Seperti apa yang dikatakan Geertz, agama juga menjadi sebuah nedua

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

pemersatu dan juga dapat menjadi media pemecah umat antar agama. Di India, negeri yang dikenal dengan keragaman keyakinannya, relasi antara komunitas Hindu dan Muslim telah lama menjadi bagian dari dinamika sosial-politik yang kompleks. Kedua agama mengalami pergesekan ditanah kelahiran agama hindu tersebut. Meski kedua komunitas agama besar ini hidup berdampingan selama berabad-abad, tak jarang relasi tersebut kerap kali diuji oleh ketegangan yang bermuatan identitas, sejarah, dan kekuasaan. Ini menjadi sebuah bukti bahwa agama hadir bukan hanya soal keyakinan spritual, namun juga sebagai sebuah hal yang dapat mengontrol ranah relasi sosial yang berkaitan dengan keharmonian.

Menurut para ahli sejarah, islam sudah masuk di India. Islam masuk di India ditandai dengan penguasan para pasukan Bani Umayyah yang membuat sebuah kerajaan pada tahun 712 M, tepatnya pada wilayah Sind dan bagian selatan Punjab. (Vincent A. Smith, 1999) Pasukan tersebut dipimpin oleh Muhammad bin Qasim Al-Thaqafi panglima perang Bani Umayyah pada masa Khalifah Walid bin Abd-Malik dan berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang besar disekitar wilayah Pakistan saat ini dan bertahan sampai kesultanan Delhi pada abad 13. (Zafar Imam, 1979) Dalam bukti lainnya, India telah lama bersentuhan langusng dengan Islam Arab. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya Masjid Cherman Juma yang terletak di Kerala, India. Masjid ini diakui sebagai masjid pertama di India yang sudah lama berdiri, bahkan sebelum penaklukan Arab atas Sind pada tahun 712. (Md. Kamrul Hasan, 2024) Dengan adanya paparan bukti diatas dapat disimpulkan bahwa telah ada interaksi Islam dan Hindu di India yang sudah terjadi semenjak zaman dahulu kala.

Selain itu, terdapat pengaruh kehadiran islam di India dalam perkembangan ekonomi india. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari kemunculannya kekaisaran Mughal yang memperkenalkan budaya islam dan administrasi islam pada tahun 1526-1858. Pada masa itu juga sering dianggap sebagai puncak dari pengaruh muslim di India, karena berhasil menaikkan level ekonomi di India serta mendorong pertumbuhan arsitektur gaya India, Persia dan Islam.(Goalen, 1992) Sehingga dengan segala dinamika yang ada pada masa itu membentuk narasi-narasi hubungan islam dan hindu yang harmonis.

Namun pada era kekuasan kekaisaran Mughal, ada salah satu pemimpin yang selalu menjadi seperti momok yang dianggap kejam bagi umat beragama Hindu. Bahkan mungkin sekarang menjadi sebuah framing umat Hindu di zaman sekarang tentang Islam yang ada di India. Kekejaman dan intoleransi agama tersebut terjadi pada kepemimpinan Aurangzeb, seorang kaisar Mughal keenam yang beragama Muslim. Ia melakukan penindasan terhadap Umat beragama Hindu. Ia mengeluarkan perintah untuk menghancurkan kuil-kuil Hindu, dengan

berdalihkan mengikuti ajaran Nabi.(Sen & Rai, 2022) Serta ia juga memberlakukan pajak Jizya kepada Non-Muslim serta mengasingkan para penduduk Non-Muslim. Tentunya dengan tindakan ini banyak menuai kritik oleh rakyat non-Muslim Mughal. Bahkan mereka menganggap pada era Aurangzeb adalah era kemunduran kekaisaran Mughal.(Zaman & Ahmad, 2023)

Islam dan Hindu masih memiliki hubungan yang baik, sebelum kolonialisme Inggris masuk untuk menjajah India pada saat itu. Masuknya era kolonilalisme Inggris ditandai dengan keruntuhan kekaisaran Mughal pada tahun 1858.(Fitrah et al., 2023) Pada era penjajah inilah India mulai mengalami beberapa perubahan yang signifikan dari segala sisi kepemerintahannya. Kedudukan Mughal sebagai kekeaisaran yang membawa India mencapai kejayaannya dideposisi oleh inggris dengan mengubah banyak aspek yang berkaitan dari negara India. Yang terjadi adalah India mengalami kemunduran dari segi politik, degradasi budaya, segi ekonomi tradisional. Sehingga dengan segala eksploitasi yang dilakukan oleh Inggris berdampak pada seluruh aspek di India. Kemunduran dan kehancuran juga dirasakan oleh para bangsawan Muslim, karena Inggris mengambil peran kekuasaan tradisional mereka.(Hardy, 1972) Era Kolonial Inggris ini, memberikan dampak yang sangat berpengaruh pada keadaan India pada zaman sekarang ini. Akibat dari Penjajahan ini adalah lahirnya perpecahan India dan Pakistan yang ingin memisahkan dan membuat daerah teritori muslim dan Hindu.

Dari semenjak adanya catatan tersebut, India atas nama hindu terus mempertahankan identitas kehinduannya. Maka banyak ketegangan antara umat agama Hindu dan Islam yang hadir dan terus mengalami eskalasi yang sangat signifikan. Ketegangan tersebut mengalami peningkatan intensitas yang cukup tajam dalam satu dekade terakhir, terutama sejak Narendra Modi, seorang tokoh politik dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP) diangkat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014. Modi, bersama partainya, membawa visi politik yang erat dengan ideologi Hindutva, yakni gagasan nasionalisme Hindu yang menekankan dominasi budaya Hindu dalam definisi keindiaan.(Rajagopal, 2008) Dalam kerangka ini, minoritas, terutama Muslim, sering kali diposisikan sebagai "yang lain", yang dianggap tidak sepenuhnya bagian dari tubuh bangsa.

Fenomena seperti pemberlakuan *Citizenship Amendment Act* (CAA) tahun 2019, kontroversi pembangunan kuil Ram di Ayodhya, serta rangkaian insiden kekerasan sektarian pasca-2014, menandai pergeseran penting dalam peran agama sebagai alat legitimasi politik. Berbagai studi sebelumnya telah membahas konflik Hindu-Muslim dari sudut historis dan sosiologis, namun sebagian besar masih bersifat segmentatif yang terfokus pada dimensi kekerasan fisik, dinamika lokal,

atau aspek hukum tertentu tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan konstruksi identitas melalui kebijakan dan narasi negara. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan teori Hasenclever & Rittberger, guna menganalisis konflik bukan semata sebagai hasil antagonisme antar-iman, tetapi sebagai produk interaksi antara eksploitasi elite politik dan rekayasa identitas melalui simbol, media, dan kebijakan publik. Pertanyaannya, apakah konflik antara Hindu dan Muslim ini benar-benar berakar dari ajaran agama itu sendiri? Ataukah agama tengah dimainkan sebagai instrumen kekuasaan yang diformulasikan secara sistematis dalam kerangka nasionalisme religius oleh elite penguasa?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis dinamika konflik antara komunitas Hindu dan Muslim di India pada periode 2014 hingga 2019, yaitu masa awal pemerintahan Narendra Modi sebagai Perdana Menteri. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam bagaimana agama memainkan peran penting, tidak hanya sebagai identitas spiritual, tetapi juga sebagai instrumen politik yang digunakan dalam konfigurasi kekuasaan negara dan narasi kebangsaan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai literatur akademik seperti artikel jurnal ilmiah, buku-buku kajian agama dan politik, laporan dari lembaga hak asasi manusia, serta sumber media massa baik cetak maupun daring. Selain itu, data juga diperoleh dari berita-berita yang beredar di berbagai situs web terpercaya yang secara spesifik mendokumentasikan peristiwa-peristiwa sektarian dan kebijakan publik yang berhubungan dengan konflik agama di India.

Analisis terhadap data dilakukan secara interpretatif dan kontekstual dengan menggunakan kerangka teori konflik agama yang dikembangkan oleh Hasenclever dan Rittberger. Teori ini membagi pendekatan terhadap konflik keagamaan ke dalam tiga perspektif utama: primordialist, yang melihat agama sebagai identitas yang tetap dan cenderung eksklusif; instrumentalist, yang menekankan peran elite politik dalam memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan; dan constructivist, yang memandang identitas agama sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui wacana, media, kebijakan, dan simbol negara. Dua pendekatan terakhir, instrumentalist dan constructivist, menjadi pilar utama dalam analisis ini karena paling relevan untuk menjelaskan bagaimana

konflik tersebut dipelihara dan dikembangkan secara sistematis melalui kebijakan dan komunikasi politik.

Untuk menjaga validitas dan kedalaman kajian, penelitian ini melakukan triangulasi sumber serta mempertimbangkan secara cermat konteks historis, sosial, dan politik dari setiap data yang dianalisis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan merangkai temuan-temuan kualitatif dalam pola naratif yang dapat menunjukkan keterkaitan antara eksploitasi politik identitas agama dengan pembentukan konflik sektarian dalam masyarakat India kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Keadaan India Pasca Kenaikan Narendra Modi

Sejak Naiknya Narendra Modi sebagai perdana Mentri, negara India mengalami transformasi yang signifikan, terutama pada aspek ekonomi dan politiknua. Setelah naiknya Narenda Modi, India menyelaraskan sistem kepemerintahannya dengan filosofi kepemerintahan yang baru dengan mengintegrasikan neo-liberalisme, kapitalisme global dan pembangunan triad kohesif. (Chakrabarti & Dhar, 2013) Triad ini tidak hanya mendefinisikan ulang lanskap ekonomi, tetapi juga mengharuskan evaluasi ulang peran negara dalam mendorong pembangunan sambil menavigasi kontradiksi yang muncul dari paradigma ekonomi baru. Di bawah kepemimpinan Modi, Bharatiya Janata Party (BJP) telah memperluas pengaruh politiknya, meningkatkan kehadirannya dari tujuh menjadi lima belas negara bagian, yang secara signifikan mengubah lanskap politik India. Dari ekspansi ini mencerminkan strategi yang lebih luas yang menjalin reformasi ekonomi dengan konsolidasi politik, sehingga memperkuat kapasitas negara untuk menerapkan kerangka ekonomi barunya secara efektif. negara India pasca-Modi dicirikan oleh interaksi kompleks transformasi ekonomi dan penyelarasan politik, didorong oleh prinsip-prinsip neo-liberalisme dan kapitalisme global, sambil berjuang untuk pertumbuhan inklusif. (Chakrabarti & Dhar, 2013)

Keadaan konflik Hindu dan Muslim di India memburuk secara signifikan sejak Narendara Modi naik menjadi perdana mentri pada tahun 2014. Kebangkitan Bharatiya Janata Party (BJP), yang ditandai dengan adanya agenda nasionalis Hindu, sehingga menciptakan dan memperburuk ketengangan antara komunitas sosial Hindu dan Muslim, terutama yang pada ranah perpolitikan. Keadaan menjadi bertambah buruk dengan adanya kebijakan BJP yang dianggap mendukung nasionalisme Hindu dan memarginalkan komunitas Muslim.(Unni, 2008) Ketika BJP telah mendapatkan dominasi, lanskap sosial-politik telah bergeser,

mengakibatkan meningkatnya kekerasan kominal selama masa jabatan Modi dengan Muslim sebagai target utama kekerasan. Laporan Komite Sachar menyoroti kesenjangan sosial ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam, mengungkapkan bahwa mereka kurang terwakili dalam pendidikan dan peluang ekonomi, yang telah diperburuk oleh iklim politik saat ini.(Unni, 2008) Maka dengan faktor-faktor tersebut koflik antara Muslim dan Hindu di India menunjukkan eskalasi yang sangat signifikan.

Selain itu, kebangkitan nasionalisme Hindu telah menyebabkan normalisasi sentimen anti-Muslim, sering didorong oleh ujaran kebencian dari para pemimpin politik dan outlet media. Polarisasi sosial ini tidak hanya mengintensifkan konflik yang ada tetapi juga berkontribusi pada budaya kekerasan, di mana insiden hukuman mati tanpa pengadilan yang menargetkan Muslim telah menjadi sangat sering terjadi, sering dikaitkan dengan tuduhan penyelundupan sapi atau hubungan antaragama. Bukan hanya itu saja, para muslim juga dipaksa untuk memakan daging babi, daging yang diharamkan bagi para muslim.(BBC News, 2019) Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA), yang menyediakan jalur menuju kewarganegaraan bagi pengungsi non-Muslim dari negara-negara tetangga, semakin memperdalam perpecahan, karena dipandang sebagai diskriminatif terhadap Muslim dan telah memicu protes yang meluas.(DW Fokus, 2024) Undang Undang ini memberikan jalur cepat kewarganegaraan bagi imigran dari negara-negara tetangga yang bukan menganut agama Islam. Meski secara resmi disebut sebagai perlindungan bagi minoritas yang teraniaya, kebijakan ini secara jelas menyingkirkan Muslim dari definisi "warga sah" India. Rezim memudahkan bagi imigran non muslim agar dapat masuk dan menetap ke negara India, sementara bagi mereka yang muslim yang berada di India diberikan syarat minimal 11 tahun menetap di Negara India.(S. Sharma, 2020) Tentu hal ini sangat terlihat jelas bahwa adanya diskriminatif atau marginalisasi para muslim di India. Dan juga merupakan strategi pemerintah untuk menyingkirkan muslim keluar dari kawasan India. Undang-undang ini, bersama dengan kebijakan lain yang dianggap sebagai pengecualian, telah menyebabkan rasa kehilangan hak di kalangan Muslim, mendorong beberapa orang untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui demonstrasi kekerasan.(Unni, 2008) Kenaikan Narendra Modi merupakan salah satu faktor terjadinya normalisai kekerasan fisik maupun simbolik yang diterima oleh para komunitas muslim yang dilakukan oleh komunitas Hindu sayap kanan.

Naiknya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India pada 2014 menandai perubahan penting dalam lanskap politik India. Modi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Utama negara bagian Gujarat dan dikenal luas karena keterlibatannya dalam kerusuhan anti-Muslim tahun 2002 datang ke panggung

nasional dengan membawa agenda politik berbasis nasionalisme Hindu (Hindutva).(Jaffrelot, 2015) Kampanyenya secara efektif memanfaatkan narasi Hindutva, yang bergema dengan sebagian besar pemilih, sehingga memfasilitasi pergeseran dalam dinamika politik India.(Patnaik, 2014) Partai yang dipimpinnya, Bharatiya Janata Party (BJP), secara ideologis berakar pada organisasi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), yang secara terang-terangan mendorong homogenisasi identitas India berbasis agama Hindu.(Rajagopal, 2008) Strategi BJP dibawah Modi melibatkan sentralisasi kekuasaan radikal dan penyimpangan dari struktur partainya tradisional, memanfaatkan dukungan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) dan sekutu lainnya untuk memperkuat agenda nasionalis Hindu.(Jaffrelot, 2015) Pendekatan ini tidak hanya meminggirkan oposisi tetapi juga memupuk lingkungan dimana sentimen anti-Muslim dapat berkembang, mencerminkan tren politik identitas yang lebih luas di India kontemporer.(Ratan, 2008) Dengan demikian, kenaikan Modi menandakan konsolidasi nasionalisme Hindu dan momen penting dalam evolusi politik India.

Selain itu, Pasal 370 Konstitusi India pada tahun yang sama berisikan tentang pemberian otonomi khusus bagi Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di India, dihapuskan.(Ahmed, 2016) Kejadian ini dianggap sebagai penghinaan langsung terhadap penduduk Muslim Jammu dan Kashmir, dan juga memperburuk ketegangan komunal antara komunitas Hindu dan Muslim.(Hoskote & Hoskote, 2017) Manuver politik yang dilakukan oleh Modi ini, sejalan dengan agenda nasionalisme Hindu yang lebih luas, yang berusaha untuk mempromosikan kepentingan Hindu seringkali dengan mengorbankan hak-hak minoritas, terutama hak-hak Muslim.(Berglund, 2004) Konteks historis konflik Kashmir, yang berakar pada perselisihan teritorial antara India dan Pakistan sejak 1947, semakin memperumit dinamika ini. Wilayah ini telah menjadi titik panas kekerasan dan kerusuhan, dengan pencabutan otonomi berfungsi untuk mengobarkan sentimen nasionalis di kedua belah pihak.(Wani, 2011) Faktor-faktor inilah yang menjadi pemicu dari gejolak-gejolak baru. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pemaksaan integrasi nasional yang tidak sensitif terhadap identitas kultural dan agama warga Kashmir.(Kiran Vinod Bhatia, 2022) Singkatnya, penghapusan status khusus Jammu dan Kashmir telah bertindak sebagai katalis untuk memperdalam perpecahan Hindu-Muslim, menjalin keluhan lokal dengan ideologi nasionalistik dan konflik sejarah, sehingga memperumit jalan menuju perdamaian dan rekonsiliasi di wilayah tersebut.(Saideman, 2005)

Di tingkat masyarakat, retorika anti-Muslim juga semakin meningkat yang dipengaruhi oleh media arus utama pro-pemerintah, yang sering membingkai Muslim dalam hal negatif. Media-media arus utama yang pro-pemerintah sering

menggambarkan Muslim sebagai ancaman demografis, pelaku terorisme, atau pihak yang tidak loyal terhadap India.(Rani & Priti, 2003) Dengan adanya gambaran tersebut berdampak pada komunitas muslim yang sering menerima perbuatan diskriminasi dan kekerasan serta menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketidakpercayaan terhadap muslim. Selain itu, Muslim sering digambarkan tidak setia kepada India, yang merusak status mereka sebagai warga negara dan berkontribusi pada narasi yang lebih luas tentang pengucilan dan kecurigaan.(Rani & Priti, 2003) Media yang diharapkan menegakkan prinsip-prisip keadilan dan representasi terhadap keadaan yang sebenarnya, tapi justru menjadi tempat mempertajam narasi pengucilan muslim sebagai minoritas di India. Pembingkaian ini tidak hanya mempengaruhi persepsi publik tetapi juga mempengaruhi kebijakan dan hubungan masyarakat, karena media memainkan peran penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap kelompok minoritas .(Rani & Priti, 2003) Dengan segala narasi yang media bangun tentang Muslim sebagai minoritas, menjadikan kondisi muslim semakin termarginalkan dalam situasi konflik ini.

Narasi seperti "love jihad" sangat terkenal pada saat itu. Narasi yang menyebut bahwa pria Muslim sengaja menikahi perempuan Hindu untuk mengislamkan mereka. istilah ini menjamur dikawasan India dan menjadi isu nasional, meskipun tidak pernah terbukti secara empirik akan hal tersebut benar adanya.(Sarkar, 2018) Konsep jihad cinta sangat terkait dengan Hindutva, kerangka ideologis yang mempromosikan nasionalisme Hindu dan sering mengabadikan narasi mayoritas, termasuk wacana jihad cinta.(Malik, 2005) Narasi "jihad Cinta" ini sengaja dibuat oleh para hindu sayap kanan untuk memarginalkan Muslim, walau Mahkamah Agung India menolak hal tesebut. Walau pihak dari mahkamah agung telah menolak, hal itu tetap menjadi sebuah narasi yang beredar dikalangan masyarakat sosial. Namun pada akhirnya muncullah penekanan dikalangan masyakat India sayap kanan yang menganggap nikah beda agama merupakan hal yang tidak baik.(Lauren Frayer, 2021) Narasi yang tidak memperbolehkan pernikahan antar agama Hindu dan Muslim bertujuan untuk mengendalikan populasi Muslim yang semakin naik.

Yang menarik adalah bahwa proses-proses ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam iklim politik yang telah disiapkan secara sistematis oleh kekuatan nasionalis Hindu. Pendidikan, media, budaya populer, dan hukum negara digunakan untuk membentuk satu pemahaman tunggal tentang apa artinya menjadi "India sejati". Berbagai cara pendekatan secara legalistik dirancang untuk membuat muslim india menjadi orang asing ditanah kelahirannya sendiri. Hal tersebut tercermin dalam konsep kuantum darah, yang menjadi tolok ukur dari identitas pribumi yang diakui berdasarkan silsilah nenek moyang dalam konteks

india.(Volpp, 2015) Warisan-warisan bahwa Muslim yang ada di India bukan bagian dari Hindu berkembang dan berubah menjadi stereotip yang mengikis identitas muslim yang pernah berdampingan dengan hindu disaat masa dahulu dalam sejarah perkembangan india. Dengan sokongan media yang ada istilah istilah tersebut menggiring dan memperkuat bahwa islam bukan dari budaya yang "nyata" dari India dan muslim bukan dari bagian pribumi.(Pack, 2012) Dari hal ini mucnculah banyak perdebatan seputar keaslian dari budaya india yang seharusnya, kemudian hal itu mengalami polarisasi dengan adanya stereotip dan definisi eksternal yang sering berbenturan dengan standar komunitas internal yang mengarah pada lanskap yang komplek tentang indentitas. Pada akhirnya, interaksi faktor-faktor ini menciptakan pemahaman beragam tentang identitas, terutama identitas muslim yang ada di India. Dalam lanskap politiklah semua ini berjalan, yaitu dengan segala rancangan undang-undang, media dan stereotip, yang berdampak pada pembangunan narasi "India Sejati" itu bukan islam maupun muslim, tetapi India yang sejati itu adalah Hindu.

Dengan segala fenomena yang terjadi tentu hal ini menjadikan pihak dari komunitas Muslim mengalami pengucilan dan mendapat berbagai tekanan. Semua tekanan yang ada berasal dari peraturan perpolitikan. Tragedi yang terjadi sepanjang kenaikan Modi, tidak lepas dari dukungan partai sayap kanan Hindu yangmenganut ideologi Hindutva, mereka ingin mengambil kembali kekuasan India dan ingin menjadikan India sebagai Hindu. Mereka ingin membangun narasi "India adalah Hindu, Hindu adalah India". Demikian, konflik Hindu-Muslim pasca-naiknya Modi bukan semata persoalan sejarah panjang permusuhan, tetapi adalah hasil dari proses politik yang menggunakan dan membentuk agama sebagai alat dan medan perjuangan identitas serta agama menjadi alat mobilisasi massa.

1.2 Asal-usul Konseptual Hindutva

Istilah Hindutva pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Vinayak Damodar Savarkar dalam bukunya "Hindutva: Who is a Hindu?" yang diterbitkan tahun 1923. Dalam buku ini, Savarkar menegaskan bahwa Hindutva bukanlah ajaran keagamaan dalam pengertian normatif atau spiritual, melainkan sebuah identitas kebangsaan yang didasarkan pada kesamaan ras, budaya, dan tanah air. Dalam pengertian ini, seseorang dianggap "Hindu" bukan karena keyakinan terhadap Dewa tertentu atau praktik ibadah, melainkan karena menganggap India sebagai pitribhumi (tanah leluhur) dan punyabhumi (tanah suci).(Vinayak Damodar Savarkar, 1928) Definisi ini secara eksplisit mengecualikan umat Islam dan Kristen, yang tempat ibadah dan sumber keagamaannya berada di luar wilayah geografis India, yakni Mekkah dan Yerusalem.

Dalam konteks ini, Hindutva adalah suatu bentuk nasionalisme kultural yang bercorak etno-religius, yang mengandaikan bahwa hanya komunitas Hindu yang berhak dan memiliki hak historis utama dan moral atas tanah India. Ideologi ini, yang diartikulasikan oleh Vinayak Damodar Savarkar dalam pamflet 1923 "Essentials of Hindutva", mempromosikan visi identitas Hindu sebagai pusat nasionalisme India, sehingga meminggirkan komunitas lain, khususnya Muslim.(Chaturvedi, 2003) Bharatiya Janata Parti (BJP), yang sejalan erat dengan Hindutva, telah berperan penting dalam mengadvokasi perspektif ini, menekankan supremasi Hindu dan hegemoni budaya dalam agenda politiknya.(Busch, 2009) Ini menjadikan Hindutva bukan sekadar sebuah konsep identitas, tetapi juga perangkat politik yang digunakan untuk membentuk dan mengklaim kekuasaan simbolik dan teritorial atas negara bangsa India yang bercorak etno-religi.

Ideologi ini mengalami artikulasi dan pelembagaan lebih lanjut melalui pendirian organisasi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) pada tahun 1925 oleh K.B. Hedgewar. RSS bertujuan menciptakan "regenerasi nasional" berbasis budaya Hindu dengan model organisasi paramiliter. RSS secara konsisten menekankan pentingnya kesatuan budaya Hindu dan memandang pluralisme serta sekularisme sebagai bentuk dekadensi moral dan ancaman terhadap stabilitas nasional.(Walter Andersen & Shridhar D. Damle, 2018) Oganisasi RSS lebih lanjut membentuk ideologi ini dan mempromosikan Hindutva melalui berbagai saluran sosial.(Lauren Frayer, 2019) Dengan hal ini mereka menolak sikap keterbukaan yang selalu digaungkan oleh paham sekularisme.

Melalui jaringan kelembagaan yang luas yang disebut sebagai Sangh Parivar (keluarga organisasi Hindu), termasuk BJP (sayap politik), Vishwa Hindu Parishad (sayap keagamaan), dan Bajrang Dal (sayap militan pemuda), Hindutva direproduksi dalam berbagai bentuk, mulai dari pendidikan alternatif, narasi sejarah, hingga propaganda sosial.(Bacchetta, 2004) Proyek ini tidak hanya berfokus pada pembentukan identitas Hindu, tetapi juga pada delegitimasi identitas non-Hindu, khususnya Muslim sebagai "orang yang asing", "yang membahayakan", atau "yang mengancam" bagi mereka penduduk Hindu asli di india. Sebagaimana dicatat oleh Jaffrelot, Hindutva bekerja secara simultan dalam dua arah: positif, dengan menanamkan kebanggaan identitas Hindu; dan negatif, dengan menciptakan musuh internal yaitu penduduk asli Muslim dan Kristen, yang diasosiasikan sebagai ancaman terhadap persatuan nasional.(Rajagopal, 2008)

Naiknya Narendra Modi, seorang kader yang diutus oleh RSS, dan naik sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014, menandai kebangkitan Hindutva ke dalam inti kekuasaan negara. Di bawah pemerintahan Modi, terdapat perubahan mendasar dalam narasi kebangsaan India: dari sekularisme pluralistik warisan

Nehruvian ke arah nasionalisme majoritarian yang menempatkan Hindu sebagai pemilik sah India. Kebijakan-kebijakan kontroversial seperti UU Citizenship Amendment Act (CAA) 2019, yang mempermudah naturalisasi bagi pengungsi non-Muslim dari negara-negara tetangga, secara efektif memarginalkan umat Muslim sebagai entitas yang dianggap tidak layak menempati India sebagai tanah Suci mereka Umat HIndu.(Human Rights Watch., 2020) Bersamaan dengan itu, gerakan sosial yang mereka buat pengistilahan sendiri menjadi sumber alasan utama. Gerakan tersebut seperti "Love Jihad" (tuduhan bahwa pria Muslim secara sistematis menikahi perempuan Hindu untuk mengislamkan mereka) dan "Gau Raksha" (perlindungan sapi yang kerap menjadi dalih kekerasan terhadap Muslim). ini merupakan alasan dan alat kekerasan simbolik dan fisik yang diberi legitimasi moral oleh narasi Hindutva.(Nussbaum, 2008, pp. 55–56)

Hal Penting yang menjadi catatan, bahwa Hindutva tidak hanya menyasar tubuh politik umat Muslim, tetapi juga pada memori sejarah dan simbol-simbol kolektif seperti Pengubahan nama jalan dan kota dari nama-nama Islam ke nama Hindu, penghapusan kontribusi Muslim dalam buku-buku sejarah, serta pembatasan praktik keagamaan Muslim di ruang publik, adalah bentuk nyata dari dampak gerakan yang berbasis religio-cultural ini.(Singh, 2018)

Berbagai akademisi telah mengkritik Hindutva sebagai bentuk pendekatan atau gerakan politik yang menggunakan simbol keagamaan yang menyerang dan mengorbankan nilai-nilai konstitusional politik seperti sekularisme, keadilan sosial, dan kesetaraan. Menurut Martha Nussbaum, Hindutva tidak hanya mengancam komunitas minoritas, tetapi juga melemahkan demokrasi India dengan menciptakan iklim ketakutan dan intoleransi dalam masyarakat India secara umum.(Nussbaum, 2008) Salah satu kritik utama terhadap ideologi Hindutva adalah tantangannya terhadap kerangka sekuler Konstitusi India. Sekularisme di India dimaksudkan untuk memastikan penghormatan yang sama terhadap semua agama, namun, kebangkitan Hindutva telah menyebabkan penafsiran ulang prinsip ini, sering kali mendukung mayoritas Hindu dengan mengorbankan hak-hak minoritas.(Rao, 2006) Hindu sayap kanan telah membajak wacana sekularisme yang ditandai dengan usaha-usaha mereka untuk menggaungkan ideologi ini sebagai bentuk dari perlawanan mereka terhadap minoritas non-Hindu yang berada di India. Kritik terhadap Hindutva sebagai gerakan politik, menuai dampak yang merugikan terhadap nilai-nilai konstitusional India. Dengan memprioritaskan nasionalisme Hindu dan menggunakan simbol-simbol agama dalam wacana politik, Hindutva tidak hanya menantang kerangka sekuler tetapi juga mengancam tatanan sosial masyarakat yang beragam, menimbulkan pertanyaan mendesak

tentang masa depan demokrasi dan kesetaraan di India, terutama pada mereka yang minoritas.(Cossman & Kapur, 2008)

Selain itu, Hindutva tidak dapat dilepaskan dari dimensi kelas dan kasta. Hubungan ini terbukti dalam evolusi historis parta dan navigasi strategis hierarki sosial. Awalnya, BJP muncul sebagai suara kebencian kasta atas terhadap meningkatnya pengaruh politik kasta bawah, terutama selama awal 1990-an. Periode ini menandai pergeseran signifikan dalam politik India, di mana BJP memanfaatkan kekhawatiran kasta atas kehilangan dominasi politik.(Basu, 1996) Dalam banyak kasus, mobilisasi massa atas nama Hindu sering kali dimotori oleh elite politik untuk mengalihkan perhatian dari isu ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Maka, Hindutva juga bisa dibaca sebagai strategi politik untuk mempertahankan dominasi kelas atas Brahmana dan elit menengah atas dengan menjadikan agama sebagai bahasa kontrol sosial.(Varshney, 2017)

1.3 Analisis Konflik Hindu-Muslim Pasca-Naiknya Narendra Modi: Pendekatan Primordialist, Instrumentalist dan Constructivist

a. Pendekatan Primordialist: Agama Hindu Secara Inharent

Pendekatan Primordialist memandang bahwa karakter agama melekat pada ideologi yang menjadikan benturan atas nama agama. Agama sering dijadikan dasar kekuatan atas pengelompokan yang membuat aliansi yang dilandasi dengan kesamaan kultur dan keyakinan.(Percy, 2001) Dengan adanya keterpanggilan yang dilandasi oleh paham yang membawa wadah religius, maka akan mempermudah para penganut ajaran tertentu untuk mengikuti kontribusi dalam melakukan sesuatu.(Agusta, 2020) Maka dari sisi pendekatan primordialis dalam memahami dan menelaah konflik menyatakan bahwa, sebuah konflik berasal dari ajaran dan ayat atau pasal agama yang ditafsirkan menjadi perintah untuk melakukan perlindungan dan serangan terhadap sesuatu.

Dalam konflik yang terjadi antara Hindu dan Islam yang ada di India, Komunitas Hindu menjadi sisi dominan dan mayoritas yang menindas umat islam. Tentu dalam konteks konflik ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditelaah, tentang ajaran agama Hindu yang menjurus pada keyakinan dan pemahaman umat Hindu yang menekan umat Muslim. Dalam Ajaran Hindu tidak mengajarkan apapun tentang semangat esklusif untuk membela agama melalui kekerasan. Di dalam islam semangat tersebut dapat diistilahkan sebagai “jihad fi sabilillah”. Dalam filsafat Hindu, sila perang secara rumit dijalin ke dalam konsep dharma (kewajiban moral) dan

kerangka etika yang ditetapkan dalam teks-teks kuno yang berada pada ajaran Khrisna. Inti dari wacana ini adalah perbedaan antara dharmayuddha (perang yang benar) dan kutayuddha (perang tidak adil), yang mencerminkan kompleksitas etika seputar peperangan dalam pemikiran Hindu. (Aiyer, 2009) Dalam ajaran Hindu tidak terdapat ajaran yang serupa dengan Jihad. Ajaran Hindu lebih identik dengan ajaran Ahimsa. Yang mengajarkan untuk tidak menyakiti, melukai, dan membunuh mahluk hidup. (Aiyer, 2009)

Ada sebuah ajaran hindu yang mendekati dengan perang, namun peperangan itu lebih menjurus pada peperangan melawan kebathilan. Ajaran perang dalam agama Hindu sangat kompleks dan beragam, terutama diartikulasikan melalui teks-teks seperti Bhagavad Gita. Kitab suci ini membahas dilema etika yang dihadapi oleh para pejuang, khususnya melalui dialog antara Krishna dan Arjuna, menekankan tanggung jawab moral yang terkait dengan peperangan.(Bose, 2012) Konteks perang ini banyak terdapat pada kitab Bhagavat Gita, yaitu kitab yang berisikan naeshat Khrisna pada Arjuna di medan pertempuran.

Setidaknya ada beberapa ayat pada Kitab Bhagavad Gita yang menceritakan tentang permasalahan peperangan yaitu :

a) Bhagavat Gita 2 : 50, ketika Krisna menyuruh Arjuna untuk berjihad, “Berjihadlah engkau demi memperoleh “Yoga” (syahid). Jihad itu demi kebaikan kamu, Jihadlah!.

b) Bhagavat Gita Ch.1 V. 42-46 : Arjuna berkata pada Sri Krisna kalau ia lebih baik mati tak bersenjata tanpa perang daripada harus membunuh saudara sepupu (Kurawa)

c) Bhagavat GitaCh. 2 : 2: Krisna berkata, “Oh Arjuna kenapa fikiran kotor itu boleh masuk ke dalam benakmu? Kalau engkau enggan berperang, engkau tidak akan masuk syurga, kenapa engkau berkata seperti itu, itu boleh melemahkan hatimu

d) Bhagavat Gita Ch. 2 : V.31-33: Hai Arjuna, kamu ini satria, kamu harus berperang. Dengan begitu engkau akan masuk syurga, mereka tidak.

Dari semua ayat yang berada di dalam tersebut terlihat hanya sebuah penisbahan pada peperangan melawan keburukan yang kisah tersebut diceritakan pada Mahabarata.

Dengan hal ini tentunya hanya kemungkinan kecil konflik Hindu dan Islam terlandaskan dengan landasan yang ada pada kitab tersebut. Dari beberapa fenomena yang ada, tentunya ada landasan lain yang menjadikan sprit Umat Hindu untuk memperjuangkan tanah India yang mereka anggap sebagai"Tanah Suci". Dukungan terbesar spirit tersebut berasal dari Ideologi Hindutva. Ideologi bukanlah ajaran keagamaan dalam pengertian normatif atau spiritual, melainkan sebuah identitas kebangsaan yang didasarkan pada kesamaan ras, budaya, dan tanah air.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya kemungkinan kecil yang dapat dinyatakan bahwa konflik ini Hindu dan Islam yang ada di India berasal dari ajaran atau perintah agama Hindu secara murni. Tentunya ada beberapa faktor penunjang selain ajaran agama Hindu yang menjadi spirit pembelaan dan penyingkiran islam yang ada di india. Ada yang beberapa narasi yang mungkin berkonversi menjadi sebuah ideologi dan gerakan yang mengatasnamakan agama, yaitu salah satuya Ideologi hindutva, yang dibentuk untuk membakar semangat para nasionalis dan rakyat India yang beragama Hindu.

b. Pendekatan Instrumentalist: Agama sebagai Alat Kekuasaan dalam Politik Hindu Nasionalis

Pendekatan instrumentalist memandang bahwa konflik yang melibatkan unsur agama bukanlah semata-mata akibat perbedaan teologis atau keimanan yang dalam, tetapi merupakan hasil dari eksploitasi agama oleh elite politik untuk tujuan kekuasaan. Dalam konteks ini, identitas agama bukanlah penyebab awal konflik, tetapi instrumen yang digunakan untuk membentuk loyalitas, memobilisasi massa, dan melegitimasi kebijakan yang diskriminatif.(Hasenclever & Rittberger, 2000) Dalam memandang konflik, pendekatan instrumentalis memandang posisi agama hanya menjadi salah satu instrument pendukung dalam tejadinya konflik Hindu dan Islam dalam konsteks konflik di India.

Posisi agama dalam konflik hanya sebagai status yang melekat pada pelaku-pelaku penggerak dalam konflik. Setelah naiknya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India pada 2014, partai yang dipimpinnya, Bharatiya Janata Party (BJP), secara eksplisit menggunakan narasi Hindutva yang merupakan suatu ideologi nasionalis Hindu yang dikembangkan oleh tokoh seperti Vinayak Damodar Savarkar untuk menggalang dukungan politik.(Rajagopal, 2008) Modi, yang berasal dari organisasi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), memperluas pengaruh RSS dalam

pemerintahan, dan mendorong reinterpretasi identitas nasional India sebagai negara Hindu, dan menolak paham sekuler. Semua organisasi ini memang beragama Hindu, namun tidak selayaknya mencerminkan ajaran-ajaran Hindu yang berkaitan dengan Ahimsa. Organisasi gerakan tersebut sudah mencerminkan maksud-maksud politik kuasa.

Modi dan BJP menggunakan isu-isu identitas keagamaan sebagai taktik pemilu yang kuat. Dalam Pemilu Umum 2014 dan 2019, misalnya, isu seperti pembangunan kuil Ram di Ayodhya dengan merobohkan Masjid Babri yang berusia 500 tahun karena mereka meyakini adanya Rama sebagai reinkarnasi Dewa Wishnu di tempat itu, penolakan terhadap "Love Jihad" (narasi bahwa pria Muslim sengaja menikahi wanita Hindu untuk mengislamisasi India), serta peran Pakistan sebagai musuh permanen, dijadikan alat retorika untuk membangun solidaritas di kalangan mayoritas Hindu dan menciptakan anggapan muslim sebagai orang lain di negara India.(Hindi News, 2021) Narasi dan isu-isu yang dibuat menjadi instrument dan sebab dari konflik yang ada.

Instrumentalisasi ini juga hadir dalam bentuk kebijakan diskriminatif. Salah satu contoh paling kontroversial adalah Citizenship Amendment Act (CAA) tahun 2019, yang memberikan kewarganegaraan lebih cepat kepada minoritas non-Muslim dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh, namun mengecualikan Muslim. Ini menciptakan persepsi bahwa Muslim bukan bagian dari "bangsa India".(S. Sharma, 2020) CAA, ketika dikombinasikan dengan National Register of Citizens (NRC), berpotensi menjadikan jutaan Muslim sebagai imigran ilegal di tanah kelahiran mereka sendiri.(Human Rights Watch., 2020) Isi dari Undang-undang tersebut adalah memberi persyaratan bagi muslim yang ingin menjadi warga negara india, diharuskan menetap dalam 11 tahun di India. Namun peraturan ini hanya berlaku pada masyarakat muslim.

Lebih lanjut, retorika kekerasan terhadap Muslim di media dan dalam pidato-pidato elite BJP juga menunjukkan eksploitasi agama sebagai alat kontrol. Narasi - narasi tersebut banyak menimbulkan kasus kekerasan, seperti kerusuhan di Delhi tahun 2020, pemerintah dituduh melakukan pembiaran bahkan keterlibatan tidak langsung.(Malhotra, 2020) Kekerasan ini tidak hanya bermotif sektarian, tetapi juga politis: Muslim dilihat sebagai elemen yang tidak loyal dan perlu adanya pengendalian atas muslim.

Melalui lensa instrumentalis, jelas bahwa elite-elite Hindu nasionalis memanfaatkan ketegangan agama sebagai alat politik. Mereka menciptakan

garis pembeda antara golongan mereka (Hindu) dan Muslim, untuk mengkonsolidasikan dukungan, menyingkirkan lawan politik, dan membentuk identitas negara sesuai agenda ideologis mereka.

c. Pendekatan Constructivist: Rekonstruksi Identitas dan Penyingkiran Simbolik Muslim dari Wacana Kebangsaan

Berbeda dengan instrumentalisme yang fokus pada kepentingan elite, pendekatan constructivist menitikberatkan pada proses sosial dan diskursif pembentukan identitas. Dalam pendekatan ini posisi agama tidak menjadi sebab dari konflik, namun agama hanya menjadi salah satu variabel dari konflik yang ada. Constructivism melihat identitas yang ada sekarang sebagai hasil konstruksi historis, budaya, dan naratif yang terus berubah. Dalam konflik, identitas keagamaan diproduksi dan dinegosiasikan melalui wacana, simbol, pendidikan, media, serta institusi negara.

Dalam pemerintahan Modi, proyek rekonstruksi identitas nasional berlangsung masif dan sistematis. India yang sebelumnya dikenal sebagai negara dengan pluralisme budaya dan agama (berdasarkan visi "Nehruvian secularism") mulai digantikan dengan versi baru identitas: India sebagai tanah air Hindu.(Nussbaum, 2008) Dalam narasi ini, umat Muslim tidak lagi dianggap sebagai bagian integral dari bangsa, tetapi sebagai orang lain atau "penumpang gelap" dari sejarah yang disebut sebagai keturunan penjajah Mughal, pelaku konversi paksa, dan ancaman demografis.(Jalal, 1995)

Proses rekonstruksi ini sangat tampak dalam kebijakan dan materi pendidikan. Kurikulum sejarah di berbagai negara bagian yang dikuasai BJP direvisi untuk menghapus atau meminimalkan kontribusi peradaban Islam. Misalnya, dinasti Mughal tidak lagi mendapat tempat penting dalam narasi sejarah India. Penekanan lebih besar diberikan pada kerajaan Hindu, mitologi Ramayana dan Mahabharata, serta tokoh-tokoh seperti Shivaji dan Rana Pratap.(Lindsay Maizland, 2020)

Selain pendidikan, media juga menjadi alat efektif dalam membentuk narasi konstruktif ini. Saluran berita arus utama sering menyebarkan representasi stereotip terhadap Muslim sebagai "radikal", "berbahaya", atau "tidak modern". Seperti yang terjadi dalam kasus pandemi COVID-19, jemaah Tablighi Jamaat dituduh sebagai penyebar virus, dan istilah "Corona Jihad" bahkan menjadi tren di media sosial.(Arundhati Roy, 2020)

Lebih jauh, konstruktivisme melihat bahwa kekerasan tidak harus selalu bersifat fisik; marginalisasi simbolik juga merupakan bentuk kekerasan struktural. Penurunan jumlah representasi Muslim di parlemen, pembatasan penggunaan bahasa Urdu di ruang publik, serta marginalisasi tradisi Islam dalam festival budaya negara adalah bentuk penyingkiran simbolik yang menciptakan batas-batas identitas baru antara Hindu dan Muslim.(Asghar Ali Engineer, 2004)

Dengan demikian, konflik tidak hanya bersumber dari perbedaan iman, melainkan dari perubahan dalam cara masyarakat melihat dan memahami satu sama lain. Pemerintah memainkan peran kunci dalam pembentukan persepsi ini, dengan membingkai Muslim sebagai "orang lain" yang tidak cocok dengan gagasan India Hindu. Melalui narasi dan simbol, Muslim dikonstruksi sebagai ancaman terhadap kesatuan nasional. Pendekatan instrumentalis dan konstruktivis tidak harus dilihat sebagai berlawanan, tetapi saling melengkapi. Elite politik (instrumentalist) mengeksploitasi identitas agama untuk kepentingan kekuasaan, namun eksploitasi itu menjadi efektif karena ia bekerja dalam ruang sosial yang telah dikonstruksi melalui wacana dan simbol (constructivist). Di sinilah kita melihat sinergi antara kepentingan elite dan proses produksi identitas kolektif.

Dalam kasus India, elite BJP menggunakan retorika anti-Muslim karena mereka tahu bahwa masyarakat telah mengalami proses konstruksi identitas yang menjadikan narasi itu kredibel. Sebaliknya, wacana-wacana baru yang eksklusif terhadap Muslim menjadi kuat karena terus diulang dan dilegitimasi oleh kekuasaan politik. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika konflik Hindu-Muslim secara menyeluruh, tidak cukup hanya dengan melihat siapa pelakunya atau bagaimana kekerasan terjadi. Kita perlu melihat bagaimana identitas dibentuk, diperjuangkan, dan dipolitisasi, serta bagaimana ideologi, media, pendidikan, dan kebijakan menjadi bagian dari mesin yang mempertajam batas antara kelompok “kami” dan “mereka”.

Penutup

Konflik antara komunitas Hindu dan Muslim di India tidak dapat dipahami semata-mata sebagai manifestasi perbedaan teologis atau antagonisme historis. Melalui lensa teori Hasenclever & Rittberger (2000), khususnya pendekatan instrumentalist dan constructivist, dapat disimpulkan bahwa konflik ini merupakan hasil dari kombinasi antara eksploitasi identitas oleh elite politik dan pembentukan ulang identitas kolektif melalui narasi sosial dan simbolik.

Pendekatan instrumentalist menunjukkan bagaimana aktor politik seperti Narendra Modi dan BJP memanfaatkan isu-isu keagamaan demi tujuan elektoral dan ideologis. Agama, dalam konteks ini, menjadi alat politik yang efektif, khususnya melalui retorika anti-Muslim, kebijakan seperti Citizenship Amendment Act (CAA), dan penguatan ideologi Hindutva.

Sementara itu, pendekatan constructivist memperlihatkan bagaimana identitas "Hindu" dan "Muslim" tidak bersifat esensial, melainkan dikonstruksi melalui media, pendidikan, institusi negara, dan ruang publik. Pemerintahan Modi berkontribusi dalam membentuk ulang narasi kebangsaan yang eksklusif terhadap umat Muslim, menyingkirkan simbol-simbol Islam dari sejarah, dan membentuk persepsi Muslim sebagai "orang luar" di tanah India.

Gabungan kedua pendekatan ini memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya bersifat vertikal antara elite dan rakyat, tetapi juga horizontal dalam masyarakat, karena terjadi proses internalisasi narasi eksklusif yang meluas. Ini menciptakan segmentasi sosial yang dalam, melemahkan pluralisme, dan memicu siklus kekerasan simbolik maupun fisik. Dengan demikian, konflik Hindu-Muslim di era Modi bukan hanya masalah identitas agama, tetapi juga refleksi dari proyek besar perubahan struktur kekuasaan dan makna nasionalisme di India modern.

Daftar Pustaka

Agusta, T. R. (2020). Gerakan Politik Dan Populisme Islam (Studi Kasus Aksi Bela Islam 411 Dan 212 Tahun 2016). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

Ahmed, N. (2016). *India's Changing Policy on Kashmir*.

Aiyer, K. R. (2009). *Dharma in the Mahabharata as a response to Ecological Crises: A speculation*. *25*(2), 18–40. http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/download/1078/1470

Arundhati Roy. (2020, April). *The pandemic is a portal*. Financial Times.

Asghar Ali Engineer. (2004). *Communal Riots After Independence: A Comprehensive Account*. Shipra.

Bacchetta, P. (2004). Gender in the Hindu nation: RSS women as ideologues. In *Feminist fine print ; 1*.

Basu, A. (1996). Caste and Class: The Rise of Hindu Nationalism in India. *Harvard International Review*, *18*(3). https://www.questia.com/library/journal/1G1-30022077/caste-and-class-the-rise-of-hindu-nationalism-in

BBC News. (2019, May 16). *Muslim di India: Insiden "dipaksa makan daging babi" dan kekerasan membuat korban tak punya alasan hidup*. BBC News Indonesia.

Berglund, H. (2004). *Hindu nationalism and democracy*. Shipra publications. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:208590

Bose, S. (2012). *Hindu Ethical Considerations in Relation to Tax Evasion* (pp. 135–147). Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1287-8_8

Busch, C. (2009). *The Policy of the Bharatiya Janata Party, 1980 and 2008: Possible Influence of Hindu Nationalism on Indian Politics*. Monterey, California. Naval Postgraduate School. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a501143.pdf

Chakrabarti, A., & Dhar, A. (2013). *Rethinking and Theorizing the Indian State in the Context of New Economic Map* (pp. 13–52). Springer, India. https://doi.org/10.1007/978-81-322-1124-2_2

Chaturvedi, V. (2003). Vinayak & me: Hindutva and the politics of naming. *Social History*, *28*(2), 156–180. https://doi.org/10.1080/0307102032000082525

Cossman, B., & Kapur, R. (2008). Secularism's Last Sigh?: The Hindu Right, the Courts, and India's Struggle for Democracy. *Social Science Research Network*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1276427

DW Fokus. (2024, March 14). *Mengapa UU Kewarganegaraan di India Begitu Kontroversial?* Dw.Com.

Fitrah, A., Sarimah, N., Febriani, E., Dinda, D., Koryati, K., Fitriani, N., & Noviani, D. (2023). Sejarah Perkembangan Dinasti Mughal dan Penguasa Muslim di Tanah India Tahun 1525-1857. *Mutiara, Bau Bau/Mutiara*, *2*(1), 283–296. https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.955

Goalen, P. (1992). *India: From Mughal Empire to British Raj*. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA22938282

Hardy. (1972). *The Muslims of British India: The effects of British rule on Muslims before 1857* (pp. 31–60). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511563287.003

Hasenclever, A., & Rittberger, V. (2000). Does religion make a difference? Theoretical approaches to the impact of faith on political conflict. *Millenium*, *29*(3). https://doi.org/10.1177/03058298000290031401

Hindi News. (2021, January). *Actor Naseeruddin Shah said- "Love Jihad" is a spectacle going on in this state*. Https://Www.Agniban.Com/.

Hoskote, A., & Hoskote, V. A. (2017). Jammu & kashmir & the politics of article 370: seeking legality for the illegitimate. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, *3*(1), 813–835. https://doi.org/10.20319/PIJSS.2017.S31.813835

Human Rights Watch. (2020, April). *"Shoot the Traitors": Discrimination Against Muslims under India's New Citizenship Policy*. Human Rights Watch.

Jaffrelot, C. (2015). The Modi-centric BJP 2014 election campaign: new techniques and old tactics. *Contemporary South Asia*, *23*(2), 151–166. https://doi.org/10.1080/09584935.2015.1027662

Jalal, A. (1995). Democracy and Authoritarianism in South Asia. In *Democracy and Authoritarianism in South Asia*. https://doi.org/10.1017/cbo9780511559372

Kiran Vinod Bhatia. (2022). The revolution will wear burqas: feminist body politics andonline activism in India. *Social Movement Studies*, *21*(5), 625–641.

Lauren Frayer. (2019, May 3). *The Powerful Group Shaping The Rise Of Hindu Nationalism In India*. Npr.Org.

Lauren Frayer. (2021, October 10). *In India, boy meets girl, proposes — and gets accused of jihad*. Npr.Org.

Lindsay Maizland. (2020, February). *India's Muslims: An Increasingly Marginalized Population*. Https://Www.Cfr.Org/.

Mahmood, S. (2011). Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject. In *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. https://doi.org/10.1525/aa.2006.108.3.603

Malhotra, P. (2020). *Delhi Riots 2020: The Untold Story*.

Malik, I. H. (2005). *Jihad, Hindutva and the Taliban: South Asia at the Crossroads*. https://www.amazon.com/Jihad-Hindutva-Taliban-South-Crossroads/dp/0195977904

Md. Kamrul Hasan. (2024). Cheraman Juma Masjid: The First Mosque in India. *International Journal for Multidisciplinary Research*, *6*(3).

Nussbaum, M. C. (2008). The Clash Within: Democracy and the Hindu Right1. *Journal of Human Development*, *9*(3). https://doi.org/10.1080/14649880802236565

Pack, S. (2012). What is a real Indian? The interminable debate of cultural authenticity. *AlterNative*, *8*(2), 176–188. https://doi.org/10.1177/117718011200800206

Patnaik, N. (2014). India's Shift to the Right. *Economic and Political Weekly*, *49*(29), 22–24. http://www.epw.in/system/files/pdf/2014_49/29/Indias_Shift_to_the_Right.pdf

Percy, M. (2001). *Religion: Mobilization and Power* (pp. 13077–13082). https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/04034-1

Rajagopal, A. (2008). Hindu Nationalism: A Reader. Edited by Christophe Jaffrelot. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007. xii + 391 pp. $65.00 Cloth, $24.95 Paper. *Politics and Religion*, *1*(3), 471–473. https://doi.org/10.1017/s1755048308000424

Rani, N. U., & Priti, K. (2003). *Indian Media Framing of the Image of Muslims: A Content Analysis of Indian English Language Newspapers*.

Rao, B. (2006). The Variant Meanings of Secularism in India: Notes Toward Conceptual Clarifications. *Journal of Church and State*, *48*(1), 47–81. https://doi.org/10.1093/JCS/48.1.47

Ratan, S. (2008). Hindutva: the shaping of a new "hindu" identity. *Southeastern Political Review*, *26*(1), 201–217. https://doi.org/10.1111/J.1747-1346.1998.TB00477.X

S. Sharma. (2020). The CAA and India's Secular Constitutional Order. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, *43*(1), 1–17.

Saideman, S. M. (2005). *The India–Pakistan Conflict: At the heart of the conflict: irredentism and Kashmir*. https://doi.org/10.1017/CBO9780511616112.010

Sarkar, T. (2018). Special guest contribution: Is love without borders possible? In *Feminist Review* (Vol. 119, Issue 1). https://doi.org/10.1057/s41305-018-0120-0

Sen, A. A., & Rai, A. (2022). A Geographical Study of Temple Desecration: The Reign of Emperor Aurangzeb in India. *Indian Historical Review*, *49*(2), 198–214. https://doi.org/10.1177/03769836221136277

Singh, M. P. (2018). Book review: Ramchandra Guha, India after Gandhi: The History of the World's Largest Democracy. *Indian Journal of Public Administration*, *64*(2). https://doi.org/10.1177/0019556117750910

Unni, U. (2008). Militant Complex: Demarginalizing Indian Muslims. *Harvard International Review*, *30*(2), 10. https://www.questia.com/library/journal/1G1-184710758/militant-complex-demarginalizing-indian-muslims

Varshney, A. (2017). Ethnic Conflict and Civic Life. In *Ethnic Conflict and Civic Life*. https://doi.org/10.12987/9780300127942

Vinayak Damodar Savarkar. (1928). *Hindutva: Who is a Hindu?* Veer Savarkar Prakashan.

Vincent A. Smith. (1999). *The Early History of India*. Atlantic Publisers And Distributor.

Volpp, L. (2015). The Indigenous as Alien. *Social Science Research Network*. https://doi.org/10.2139/SSRN.2653969

Walter Andersen, & Shridhar D. Damle. (2018). *Messengers of Hindu Nationalism: How the RSS Reshaped India*. Hurst.

Wani, H. A. (2011). Kashmir Conflict: The Process of Conflict Resolution and Conflict Management. *Research Journal of Humanities and Social Sciences*, *2*(3), 125–131. https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:rjhss&volume=2&issue=3&article=011

Zafar Imam. (1979). *Muslims in India*. Sangam Books Ltd.

Zaman, A., & Ahmad, M. (2023). Reevaluating the Religio-Political Policies of Aurangzeb Alamgir: A Critical Insight from Indian Historians. *Journal of Islamic Thought and Civilization*. https://doi.org/10.32350/jitc.132.08

Biografi Singkat Penulis

Febrian Arif Pratama, Lahir di Pekanbaru pada 07 Februari 1999, anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bahrain Tasruddin (Sulawesi Tenggara-Kendari-Kolaka) dan T.Firawani (Riau-Selatpanjang), dan tumbuh besar di Riau. Setelah lulus pendidikan dasar, 2005-2011, di SDS Yayasan Pendidikan Persada Indah, ia pergi *nyantri* di Pondok Modern

Darussalam Gontor Ponorogo, menjadi santri pada 2011-2017, kemudian ia menjadi guru Gontor pada tahun 2017-2024, selama menjadi Guru ia menyelesaikan perkuliahan di jenjang S1 di Universitas Darussalam Gontor, Fakultas Ushuluddin, Prodi Studi Agama-Agama. Sekarang (2025) ia melanjutkan studi S2 di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, di Prodi Studi Agama-Agama dan Resolusi Konflik.